

RETRIBUSI DAERAH-PAJAK DAERAH

2023

PERDA NO. 7, LD 2023/NO. 7 TLD. 7, 180 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK** :
- pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan, akuntabilitas, keadilan dan kemandirian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dikelola dan menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah;
 - perubahan pengaturan dibidang perpajakan dan retribusi di daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan amanat undang-undang, sehingga perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.
 - Perda ini mengatur jenis Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Jenis pajak yang dipungut daerah: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas : 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet h. Opsen PKB; dan; i. Opsen BBNKB. Jenis retribusi yang dipungut daerah: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2023.
 - Berlakunya Perda ini, mencabut dan tidak berlaku lagi Perda di bawah ini:
 1. Perda KSB Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri
 2. Perda KSB Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 3. Perda KSB Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan
 4. Perda KSB Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pematangan Hewan
 5. Perda KSB Nomor 1 Tahun 2010 tentang Komisi Kegiatan Pertambangan
 6. Perda KSB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
 7. Perda KSB Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
 8. Perda KSB Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
 9. Perda KSB Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
 10. Perda KSB Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
 11. Perda KSB Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
 12. Perda KSB Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 13. Perda KSB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
 14. Perda KSB Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
 16. Perda KSB Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
 17. Perda KSB Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 18. Perda KSB Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
 19. Perda KSB Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 20. Perda KSB Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 21. Perda KSB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perda KSB

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 23. Perda KSB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan 24. Perda KSB Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Perda KSB Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 25. Perda KSB Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 26. Perda KSB Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 27. Perda KSB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 28. Perda KSB Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 29. Perda KSB Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-S5dfa' Sumbawa Barat 30. Perda KSB Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat 31. Perda KSB Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang